

JWE

by Fekon Uniga

Submission date: 22-Nov-2021 02:57PM (UTC+1100)

Submission ID: 1709732274

File name: 2_new_1429-4010-1-SM.docx (547.96K)

Word count: 3197

Character count: 21024



26 **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut**

Abstract

Tinjauan ini berencana untuk menganalisis dampak tanggung jawab, keterusterangan dan kerjasama dalam penatausahaan aset kota oleh otoritas kota di kota-kota di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Faktor-faktor dari tinjauan ini terdiri dari tanggung jawab, keterusterangan, dan minat sebagai faktor bebas dan toko kota eksekutif sebagai variabel terikat. Estimasi yang digunakan dalam review ini adalah skala ordinal. Teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah strategi pengenalan dengan metodologi kuantitatif. Tes pemeriksaan diperoleh dengan menggunakan prosedur pemeriksaan purposive, sehingga ada 78 responden yang digunakan dalam pemeriksaan ini. Tinjauan ini menggunakan strategi pengujian faktual yang meliputi uji legitimasi, uji kualitas tak tergoyahkan, uji anggapan tradisional dan uji kekambuhan langsung yang berbeda dengan menggunakan alat ukur untuk pengaturan administrasi (SPSS) formulir 21. Pengujian spekulasi menggunakan uji-t dengan tingkat kepentingan 5%. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab, keterusterangan dan investasi fraksional secara signifikan mempengaruhi administrasi aset kota oleh otoritas kota di kota-kota di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

6
Kata Kunci: Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa, Transparansi

14
Abstract

This review means to inspect the impact of responsibility, straightforwardness and investment in the administration of town assets by town authorities in towns in Samarang Sub-District, Garut Regency. The factors of this review consisted of responsibility, straightforwardness, and investment as autonomous factors and town reserve the board as the reliant variable. The estimation utilized in this review is the ordinal scale. The strategy utilized in this examination is an acquainted engaging technique with a quantitative methodology. The exploration test was acquired utilizing purposive inspecting procedure, so that there were 78 respondents utilized in this review. This review utilizes factual testing methods including legitimacy test, dependability test, exemplary suspicion test and different straight relapse examination utilizing measurable for administrations arrangement (SPSS) adaptation 21. Speculation testing utilizes t test with an importance level of 5%. The consequences of this review demonstrate that responsibility, straightforwardness and investment to some extent significantly affect the administration of town assets by the town contraction in towns in Samarang District, Garut Regency.

Keywords: Accountability, Participation and Management Of Village reserves, Transparency

1 Pendahuluan

Paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat) kini mengalami perubahan menjadi desentralistik (otonomi daerah). Adanya perubahan ini luar biasa mempengaruhi unsur-unsur organisasi pemerintahan terdekat untuk mengakui pemerintahan yang besar dan definitif (great administration). Demikian juga, ia memperoleh konsekuensi untuk area jenis tanggung jawab untuk penugasan aset yang diklaim dengan cara yang sukses dan mahir. Sebagian besar aset akan memiliki saran untuk kemajuan lokal sehingga dapat berjalan sesuai dengan bentuk (Ultafiah, 2017).

Kemajuan yang mendasari kota untuk mempraktekkan posisinya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN. Salah satu bentuk substansial dari pengakuan negara atas hak-hak istimewa titik awal kota dan pakar lingkungan dalam skala kota adalah Dana Desa. Dana Desa ini diandalkan untuk memberikan energi ekstra kepada Desa dalam menyelesaikan pergantian acara penguatan Desa menuju Desa yang kokoh, maju dan bebas. Badan publik juga memberikan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bersumber dari cadangan APBN dan langsung diperoleh kota.

Administrasi moneter kota adalah perkembangan siklus terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu fase kemudian ke fase berikutnya. Pemerintah kota akan berjalan dengan baik jika siklus administrasi moneter kota berjalan dengan baik. Apalagi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan penyelenggaraan keuangan kota diselesaikan secara lugas, bertanggung jawab dan partisipatif secara tepat dan disiplin moneter.

Keajaiban yang terjadi di kota-kota di kecamatan Samarang ini tergantung dari pertemuan-pertemuan primer yang dipimpin oleh para ahli pada salah satu staf yang bekerja di kecamatan Samarang, khususnya pemerintah kota baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola dananya yang tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal-hal yang tidak sesuai antara lain pelaksanaan kelurahan para pengurus yang masih lemah, pemkot belum mampu di bidangnya, dan pelaksanaan fikir kota belum didorong. Administrasi besar cadangan kota adalah para eksekutif yang dapat berjalan dengan baik dari keinginan menjadi tanggung jawab.

Melihat persoalan-persoalan tersebut di atas, untuk mengakui great town store para pelaksana dengan standar Good Governance membutuhkan tanggung jawab, keterusterangan dan dukungan. Aturan ini direncanakan agar perangkat kota dapat bertindak sesuai dengan pedoman moral dan materi yang sah dengan memberikan komitmen untuk administrasi aset publik kepada pihak pemberi perintah (Prinsip) atau individu yang diinvestasikan (Mahmudi, 2015:9).

Beberapa penyelidikan masa lalu di cagar kota, para eksekutif menunjukkan berbagai hasil dari satu sama lain. Pemeriksaan yang diarahkan oleh Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab dan keterusterangan agak mempengaruhi administrasi keuangan kota. Eksplorasi yang dipimpin oleh Putra (2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak berdampak pada administrasi moneter pemerintah terdekat. Selain itu, penelitian yang dipimpin oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti yang tepat bahwa keterusterangan tidak berdampak kritis pada administrasi moneter provinsi. Kemudian, pada saat itu, eksplorasi yang diarahkan oleh Medianti (2018) memberikan hasil bahwa dukungan daerah mempengaruhi administrasi cagar kota. Daripada eksplorasi yang dipimpin oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa kerjasama daerah tidak berdampak pada administrasi kota cadangan.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntabilitas

9
Tanggung jawab adalah komitmen wali (ahli) untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap segala jenis gerakan dan latihan yang menjadi kewajibannya kepada (kepala) yang berhak dan berwenang untuk meminta tanggung jawab tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).

2.2 Transparansi

Kejelasan adalah klarifikasi administrasi asosiasi area publik tentang latihan, proyek dan pengaturan yang telah, sedang dan akan dilakukan bersama aset yang digunakan (Mardiasmo, 2009:19).

2.3 Partisipasi

6
Dukungan adalah masuknya wilayah lokal secara dinamis baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga agen yang dapat menyalurkan tujuannya. Dukungan tersebut didasarkan pada peluang afiliasi dan wacana serta kepentingan produktif. (Mardiasmo, 2009:10).

7 2.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, pertanggungjawaban yang dilakukan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Permendagri No. 20 Tahun 2018)

2.5 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengakuan tanggung jawab adalah tujuan utama dari perubahan area publik. Kepentingan tanggung jawab mengharuskan yayasan area publik untuk lebih menekankan pada tanggung jawab tingkat, bukan hanya tanggung jawab vertikal. Ketertarikan yang kemudian muncul adalah perlunya membuat laporan moneter luar yang dapat menggambarkan penyajian wilayah publik (Pertiwi, 2015). Hubungan atau signifikansi tanggung jawab dengan administrasi moneter dapat dilihat bahwa tanggung jawab adalah cara yang dengan baik sistem yang sah diikuti untuk membentuk pilihan implementasi kebijakan yang harus diperhatikan oleh pegawai pemerintah dan spesialis publik. Tanggung jawab menggabungkan kehadiran instrumen yang membujuk pembuat undang-undang dan otoritas pemerintah dari kegiatan mereka dalam memanfaatkan aset publik dan pameran perilaku mereka. Tanggung jawab juga diidentikkan dengan tanggung jawab atas kecukupan latihan dalam mencapai tujuan atau fokus pendekatan atau proyek (Putra, 2017).

Eksplorasi yang dipimpin oleh Utami dan Nurodi (2017) memberikan hasil bahwa tanggung jawab mempengaruhi administrasi keuangan kota. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dipimpin oleh Alqodri (2015) yang memberikan hasil bahwa tanggung jawab moneter memiliki hasil konstruktif yang kritis pada administrasi moneter daerah. Mengingat keajaiban di atas, analisis menganggap bahwa ada dampak tanggung jawab pada administrasi cadangan kota. Jadi teori yang bisa diambil adalah bahwa tanggung jawab mempengaruhi administrasi kota cadangan.

H1 : Ada pengaruh antara tanggung jawab penatausahaan aset kota oleh perangkat desa di kota-kota di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

2.6 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Upaya untuk lebih mengembangkan cagar kota para eksekutif harus tersedia untuk semua data yang didapat dan termasuk daerah setempat. Penerimaan atau data yang diperoleh dan pergaulan masyarakat dalam penatausahaan cadangan kota merupakan awal dari penyusunan perencanaan APBDes melalui pertimbangan rencana perbaikan (musrenbang) pada tingkat yang berbeda. Pada saat mempertimbangkan rencana perbaikan, proposisi kemajuan tergantung pada skala kebutuhan yang diajukan secara langsung oleh orang-orang pada umumnya. Pelaksanaan konsultasi rencana perbaikan yang telah disusun tergantung pada skala kebutuhan harus sesuai dengan proposisi dalam pertimbangan rencana peningkatan. Semakin sederhana otoritas publik terhadap pengaturan kemajuan dan administrasi moneter, semakin mudah untuk mengakui administrasi yang dapat diterima (Putra, 2017).

Pemeriksaan yang diarahkan oleh Utami dan Nurodin (2017) memberikan hasil bahwa keterusterangan mempengaruhi administrasi keuangan kota. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti eksperimental bahwa keterusterangan tidak secara signifikan mempengaruhi administrasi keuangan daerah, sehingga analisis berteori bahwa keterusterangan mempengaruhi administrasi cadangan kota.

H2: Ada pengaruh antara keterusterangan dalam penatausahaan aset kota oleh pemerintah kota di kota-kota di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

2.7 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Investasi dalam administrasi kota cadangan sangat penting untuk bekerja pada administrasi yang kuat, jika ada kesalahan dalam pemanfaatan aset tersebut, daerah dapat mengeluh untuk menunjuk eksekutif. Ketertarikan kelompok masyarakat yang tinggi terhadap penyelenggaraan bantuan kota akan mengurangi munculnya blunder. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi jumlah orang yang terlibat dengan dinamis dan pelaksanaan latihan yang diidentifikasi dengan kebutuhan daerah setempat. Semakin tinggi asosiasi individu maka semakin tinggi pula kesadaran akan harapan tertentu untuk melakukan pilihan yang telah diambil, dan perbaikannya akan semakin baik di kemudian hari. Peningkatan besar merupakan dampak dari good town reserve para eksekutif (Medianti, 2018).

Pemeriksaan yang diarahkan oleh Medianti (2018) menunjukkan bahwa dukungan daerah mempengaruhi administrasi cagar kota. Hasil ini tidak sesuai dengan eksplorasi yang dipimpin oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa dukungan tidak berdampak pada administrasi kota cadangan, sehingga spesialis mengambil spekulasi bahwa kerjasama mempengaruhi administrasi kota cadangan.

H3 : Ada pengaruh antara penanaman modal dalam penatausahaan aset kota oleh pemerintah kota di kota-kota di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

3 Metode Penelitian

Populasi dalam tinjauan ini adalah pemerintah kota di 13 kota di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, ke atas dari 143 orang. Sedangkan contoh dalam tinjauan ini adalah walikota, sekda, walikota, pejabat keuangan, bagian kepengurusan, dan pegawai pembantu pemerintah perseorangan, dengan jumlah responden sebanyak 78 orang.

Jenis informasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah informasi penting. Informasi penting adalah informasi yang bersumber dari tanggapan responden terhadap proklamasi yang diidentikkan dengan tanggung jawab, keterusterangan, dan minat terhadap administrasi cagar kota.

Metode pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan survei dan vis-à-vis atau pertemuan langsung. Jajak pendapat adalah daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya di mana responden akan mempertanggungjawabkan jawaban mereka, biasanya dalam opsi yang ditandai dengan jelas (Sekaran, 2017: 170). Responden yang dipilih sebanyak 78 responden.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

$$\text{Skor Total} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Narimawati (2010:45)

Skor asli adalah respons yang tepat, semuanya setara, terhadap survei yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot yang paling diperhatikan atau semua responden diharapkan untuk memilih jawaban yang sesuai dengan skor yang paling tinggi. Beratnya skor sebenarnya dapat ditemukan pada tabel berikut:

Tabel 1: Kriteria persentase tanggapan responden

No	Jumlah	Kriteria
1	20 – 36%	Tidak baik
2	36,01- 52,00%	Kurang baik
3	52,01- 68,00%	Cukup
4	68,01- 84,00%	Baik
5	84,01% - 100%	Sangat baik

Sumber: Umi Narimawati (2010:85)

Akuntabilitas memiliki rata-rata skor ideal sebesar 83,13%. sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator akuntabilitas kejujuran sebesar 86,67%, akuntabilitas manajerial 83,76%, akuntabilitas program 80,94%, akuntabilitas kebijakan 81,62% dan akuntabilitas finansial 82,44%.

Transparansi memiliki total rata-rata skor ideal sebesar 82,68%, sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator informatif sebesar 84,70%, indikator keterbukaan 76,24%, dan indikator pengungkapan sebesar 87,04%.

Partisipasi memiliki total rata-rata skor sebesar 73,30%, sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator pengambilan keputusan 81,30%, indikator pelaksanaan 70,26%, indikator pengambilan manfaat sebesar 75,13% dan indikator evaluasi sebesar 65,90%.

Pengelolaan dana desa memiliki total rata-rata sebesar 87,15%, sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator perencanaan 88,42%, indikator pelaksanaan 86,05%, indikator penatausahaan sebesar 88,21%, indikator pelaporan sebesar 88,80% dan indikator pertanggungjawaban sebesar 87,44%.

14 Uji legitimasi dilakukan dengan membandingkan r yang ditentukan dan R tabel pada derajat kritis 5%. Jika r hitung $>$ r tabel, alat penduga yang digunakan dinyatakan substansial. nilai r tabel dapat diperoleh dari $n = 78 - 3 - 1 = 74$ maka nilai r tabel = 0,227.

Konsekuensi pengujian keabsahan informasi untuk semua hal penegasan pada faktor-faktor pencadangan kota para eksekutif, tanggung jawab, keterusterangan dan investasi memiliki nilai juggling ar number lebih penting daripada r tabel (r hitung $>$ 0,227), sehingga cenderung beralasan bahwa Semua hal penegasan dalam variabel pemeriksaan ini dinyatakan substansial.

Tes kualitas yang tak tergoayahkan dapat dilakukan pada saat yang sama pada semua hal pernyataan untuk lebih dari satu variabel. Uji ketergantungan dilakukan dengan mengerjakan ukuran Cronbach's Alpha. Jika koefisien alfa berikutnya 0,7, penunjuk dinyatakan solid.

8 Tabel 2: Hasil uji reliabilitas

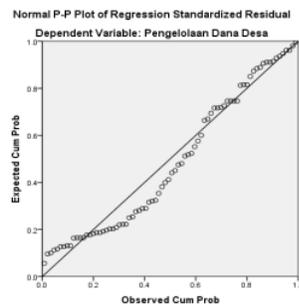
Variabel	Cronbach's Alpha	R _{tabel}
X1	0,832	0,227
X2	0,837	0,227
X3	0,852	0,227
Y	0,955	0,227

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan informasi di atas, menunjukkan bahwa koefisien alpha Cronbach lebih menonjol dari 0,7, sehingga cenderung beralasan bahwa semua instrumen dalam tinjauan ini dapat diandalkan.

Sebelum melakukan kekambuhan, ada syarat yang harus dilalui, khususnya tes anggapan tradisional. Model relaps harus dibebaskan dari kecurigaan gaya lama, khususnya dibebaskan dari keterbiasaan, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dalam model relaps, nilai sisa harus mengikuti dispersi khas dan dibebaskan dari hubungan antara faktor otonom (Ghozali, 2006).

18 Dengan menggunakan P-P Plot tipikal, sangat terlihat bahwa jika informasi menyebar di sekitar garis miring dan mengikuti arah garis miring, maka, pada titik itu, model kekambuhan memenuhi anggapan kewajaran.



Gambar 1: Output hasil uji normalitas

Melihat Gambar 1 di atas, sangat baik dapat disimpulkan bahwa diagram plot P biasa menunjukkan bahwa fokus menyebar di sekitar sudut ke garis sudut dan apropriasi mengikuti

heading miring, sehingga grafik menunjukkan bahwa model kekambuhan dimungkinkan karena memenuhi anggapan biasa-biasa saja.

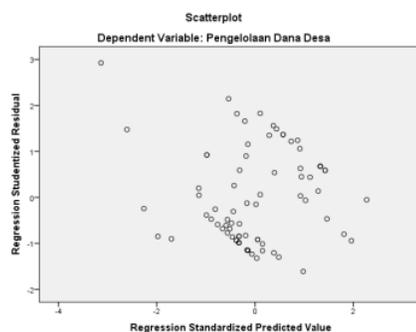
Uji multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai selisih pembengkakan (VIF) dan nilai resistansi. Dalam hal hasil pengujian menyatakan bahwa harga VIF < 10 dan harga resistansi > 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian jika nilai VIF > 10 dan nilai resistansi < 0,10, dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Tabel 3: Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
X1	0,614	1,630
X2	0,591	1,693
X3	0,897	1,115

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Dilihat dari konsekuensi uji multikolinearitas pada tabel di atas, cenderung terlihat bahwa nilai resistansi lebih penting dari 0,10 dan nilai VIF variabel di bawah 10, sehingga sangat beralasan untuk tidak multikolinearitas.



Gambar 2: Output hasil uji heteroskedastisitas (Scatterplot)

Berdasarkan Gambar 2 antara kualitas yang diharapkan dari faktor yang bergantung dan yang tersisa, hasilnya adalah tidak ada contoh palsu dan pusat menyebar di atas dan di bawah angka 0 di pusat Y, sehingga secara umum akan diterima bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya autokorelasi, digunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Autokorelasi diakui dengan penghargaan Durbin Watson. Batasan tidak autokorelasi adalah jika angka yang ditampilkan dari harga Durbin Watson antara - 2 sampai +2, dapat dikatakan bahwa model relaps tidak memiliki autokorelasi.

24
 Tabel 4: Hasil uji autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,129	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

19
Berdasarkan tabel 4 di atas, cenderung terlihat bahwa harga Durbin Watson berada di antara - 2 dan +2 = - 2 < 1,129 < +2. Sehingga cenderung beralasan bahwa tidak ditemukan autokorelasi pada model relaps.

23
Akibat dari berbagai pemeriksaan kekambuhan langsung ini tidak hanya melihat apakah variabel otonom berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, namun juga dapat melihat arah pengaruhnya. Mengingat hasil perhitungan, kondisi kekambuhan langsung yang berbeda yang menyertai diperoleh:

$$Y = 19,601 + 0,626 X1 + 0,956 X2 + 0,526 X3 + e$$

Keterangan:

- a : nilai konsisten (a) dari 19,601. Ini berarti bahwa jika faktor bebas dianggap nol (0), administrasi cadangan kota bernilai 19.601.
- 1 : Nilai koefisien relaps variabel tanggung jawab (X1) adalah 0,626. Artinya setiap penambahan 1 unit tanggung jawab akan menambah administrasi aset kota sebesar 0,626.
- 2 : Nilai koefisien relaps variabel kelurusan (X2) adalah 0,956. Artinya untuk setiap perluasan 1 unit secara lugas akan membangun administrasi aset kota sebesar 0,956.
- 3 : Nilai koefisien relaps variabel anggota (X3) adalah 0,526. Artinya untuk setiap 1 unit pemekaran yang dikerjasamakan akan menambah administrasi aset kota sebesar 0,526.
- E : Kesalahan standar adalah variabel arbitrer dan memiliki kemungkinan sirkulasi yang membahas semua faktor yang mempengaruhi Y namun dikeluarkan dari situasi.

Konsekuensi uji pengujian spekulasi untuk menguji teori dalam tinjauan ini, para ilmuwan menggunakan uji-t untuk menemukan seberapa besar pengaruh satu faktor bebas secara terpisah dalam mengklarifikasi variabel terikat. Pengujian harus dimungkinkan dengan membandingkan nilai thitung dan nilai ttabel dan membandingkan nilai besar t dan derajat kritis (α). Nilai derajat kepentingan yang digunakan dalam tinjauan ini adalah 5% (0,05). Dengan asumsi sig t lebih menonjol dari 0,05, H0 diakui. Selanjutnya, sebaliknya dengan asumsi sig t di bawah 0,05, H0 ditolak. Jika H0 ditolak, berarti terdapat pengaruh kritis antara faktor bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:40).

6 4.1.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Tabel 5: Hasil pengujian hipotesis pertama

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama			
Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.
X1	2,738	1,993	0,008

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Dilihat dari tabel 5 di atas, sangat terlihat bahwa thitung > ttabel adalah 2,738 > 1,993 dengan nilai kepentingan 0,008 dan tingkat kesalahan (alpha) 0,05. Mengingat efek samping dari tes ini, ada pilihan bahwa H0 ditolak dan H1 diakui. Dengan demikian, tanggung jawab mempengaruhi administrasi cadangan kota.

4.1.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Tabel 6: Hasil pengujian hipotesis kedua

Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.
X2	3,024	1,993	0,003

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas, cenderung terlihat bahwa thitung > ttabel adalah $3,024 > 1,993$ dengan nilai kepentingan 0,003 dan blunder rate (alpha) 0,05. Mengingat efek samping dari tes ini, ada pilihan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diakui. Oleh karena itu, keterusterangan mempengaruhi administrasi cagar alam kota.

4.1.3 Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Tabel 7: Hasil pengujian hipotesis ketiga

Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.
X3	2,519	1,993	0,014

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Dilihat dari tabel 7 di atas, sangat terlihat bahwa thitung > ttabel adalah $2,519 > 1,993$ dengan nilai kepentingan 0,014 dan tingkat kesalahan (alpha) 0,05. Mengingat konsekuensi dari tes ini, ada pilihan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diakui. Selanjutnya, investasi mempengaruhi administrasi cadangan kota.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian dari tanggapan survei yang disampaikan kepada 78 responden di 13 kota di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (X1) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan kota cadangan (Y). Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang vital dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani Dana Desa.
2. Keterbukaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap tata kota (Y). Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa keterusterangan sangat penting dalam mengawasi cagar alam kota.
3. Bunga (X3) berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan kota cadangan (Y). Efek lanjutan dari tinjauan ini menunjukkan bahwa investasi sangat penting dalam mengawasi cagar alam kota, asosiasi daerah setempat dalam mengawasi subsidi kota akan memperkuat hubungan positif antara daerah setempat dan pemerintah kota.

Maka dari itu, saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan yaitu:

a. Bagi Pemerintah

1. Pemerintah hendaknya mampu mengadakan pelatihan bagi pejabat teknik pengelola keuangan desa (PTPKD) untuk dapat melakukan analisis biaya manfaat mengenai program kerja pemerintah desa kedepannya.
2. Pemerintah desa hendaknya mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban.

3. Pemerintah desa hendaknya mampu menyajikan laporan realisasi dana desa secara lengkap dan tepat waktu untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran.
 4. Hendaknya setiap pelaksanaan musrembang mampu diikuti oleh unsur muspida untuk meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa.
 5. Pemerintah desa hendaknya mampu mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku dan melakukan analisis komparasi atau perbandingan antara realisasi fisik yang sudah dicapai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya**
1. Untuk analisis tambahan, diharapkan untuk melihat dan menambahkan faktor-faktor otonom yang mempengaruhi administrasi aset kota seperti keterampilan aset manusia, kontrol SPI, dll.
 2. Diharapkan juga peneliti selanjutnya bisa meneliti atau melakukan uji beda antara sumber daya yang tingkat pendidikannya SMA dan bukan SMA.

10
Daftar Pustaka

- Alqodri, M., (2015). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Dumai), *JOM.FEKON*, 2(2).
- 13
Ghozali, I., (2016). *Pemanfaatan Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23* (Ed. 8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 28
Mahmudi., (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ed. 3, Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- 5
Mardiasmo., (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Umma., (2017). *Metode Ujian Pendekatan Pengembangan Usaha-Keterampilan*. Jakarta.
- 11
Salemba Empat.
- Suparno., (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan*. Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Umami, Nuruddin., (2017). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* (Vol. 6 Ed. 11). ISSN 20886969.

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uniga.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	2%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	Submitted to Sekolah Tinggi Teknologi Garut Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%
6	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	1%
8	docshare.tips Internet Source	1%

9	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
10	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
11	www.neliti.com Internet Source	1 %
12	www.scribd.com Internet Source	1 %
13	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
14	jurnal.unpand.ac.id Internet Source	<1 %
15	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1 %
19	id.scribd.com Internet Source	<1 %
20	repository.unej.ac.id	

Internet Source

<1 %

21

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

22

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

23

docobook.com

Internet Source

<1 %

24

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

25

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

26

repository.umpalopo.ac.id

Internet Source

<1 %

27

blog.binadarma.ac.id

Internet Source

<1 %

28

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off